

SISTEM PENCATATAN SIRKULASI DOKUMEN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI ACEH

Andre Pratama Adiwijaya

*Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Gunadarma
andrepratama16@gmail.com*

Abstrak

Alur dokumen adalah siklus hidup dokumen dari hulu sampai hilir yang melibatkan beberapa aktor untuk pendisposisian dokumen tersebut. Banyak instansi yang masuk menggunakan sistem konvensional untuk melakukan alur dokumen pada instansinya yang menyebabkan hilangnya bagian dari dokumen maupun hilangnya dokumen tersebut dan tidak termonitor letak keberadaan dokumen saat melakukan disposisi. Yang membuat user pada instansi tersebut susah melakukan pengumpulan kembali dokumen-dokumen yang sudah didisposisikan. Sistem pencatatan sirkulasi dokumen perizinan adalah salah satu wadah untuk memonitoring dokumen-dokumen yang didisposisikan. Sistem ini juga dapat membuat form dinamic, aktor yang menggunakan aplikasi dan penuntuan alur yang membuat dokumen tetap termonitor walupun didisposisikan ke lain instansi. Alur dokumen adalah siklus hidup dokumen dari hulu sampai hilir yang melibatkan beberapa aktor untuk pendisposisian dokumen tersebut. Banyak instansi yang masuk menggunakan sistem konvensional untuk melakukan alur dokumen pada instansinya yang menyebabkan hilangnya bagian dari dokumen maupun hilangnya dokumen tersebut dan tidak termonitor letak keberadaan dokumen saat melakukan disposisi. Sistem ini juga dapat membuat form dinamik, actor yang menggunakan aplikasi dan penuntuan alur yang membuat dokumen tetap termonitor walupun didisposisikan ke lain instansi.

Kata Kunci : *Perizinan Online, Sirkulasi Dokumen BP2T Provinsi Aceh, Pemohon.*

LICENSE DOCUMENT CIRCULATION RECORDING SYSTEM ON ACEH PROVINCE INTERGRATED LICESING SERVICES

Abstract

The flow of documents is the life cycle of documents from upstream to downstream involving multiple actors for the document's disposition. Many institutions use conventional systems as their documents stream-flow in their institution, resulting part of the documents loss or the loss of documents and unmonitored where about of documents while disposing. Which makes the user at the institution difficult to do the recollection of documents-documents that have been disposition? The recording of licensing documents circulation is one of the medium to monitor the dispositions documents. This system can also create dynamic forms, for user by using apps and paths-guidance that keep the document monitored even if it is disposed to other institutions.

Keywords : *online licensing, document circulation BP2T Aceh Province, The Applicant.*

PENDAHULUAN

Kebijakan penerapan Perizinan terpadu berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah sangat membantu mempermudah proses pengajuan proses perizinan dari masyarakat kepada pemerintah. Teknologi Informasi yang saat ini berkembang cukup pesat dapat digunakan sebagai sarana untuk membantu penerapan pelayanan terpadu tersebut. Perangkat lunak berbasis teknologi informasi dapat mengolah informasi dan data dengan lebih cepat dan akurat. Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi perizinan terpadu yang diharapkan dapat membantu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam rangka memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat agar lebih optimal, transparan, efektif dan efisien. Aplikasi perizinan dengan berbasis web akan dapat membantu mengurangi kendala dalam proses operasionalisasi sistem aplikasi tersebut karena pengguna aplikasi sistem perizinan ini sangat dimungkinkan memiliki berbagai macam platform.

Dengan sistem aplikasi berbasis web maka aplikasi ini dapat multi-platform yang dapat diakses oleh semua pengguna baik itu operator maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan sistem ini. Aplikasi berbasis web juga akan memudahkan dalam proses integrasi dengan sistem lainnya apabila nantinya dalam pengembangan sistem ini diperlukan integrasi dengan sistem aplikasi yang lain, selain itu dengan berbasis web maka masyarakat dapat mengakses sistem perizinan terpadu ini melalui internet. Untuk mendekatkan diri antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan masyarakat maka perlu dibuat sebuah media komunikasi yang dapat dijadikan sebagai saluran pengaduan, pemberian masukan dan lain-lain dari masyarakat kepada Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Aceh. Masukan maupun pengaduan dari masyarakat secara langsung dapat membantu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) untuk mereview kinerjanya yang diharapkan dapat terus menerus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga citra pemerintah Provinsi Aceh dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sebagai garda terdepan dalam proses perizinan dapat semakin meningkat di mata masyarakat. Pemilihan sistem pengaduan perizinan berbasis web ini adalah pemilihan teknologi yang cukup tepat karena kedua teknologi tersebut sudah cukup dikenal dimasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penulis telah membuat suatu pedoman/prinsip untuk melaksanakan penelitian ini yang akan menjadi dasar pelaksanaan studi. Adapun pedoman prinsip dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara Tim. Tim Konsultan di bawah pimpinan Team Leader akan selalu melakukan koordinasi antara sesama anggota Tim. Hal ini perlu dilakukan agar seluruh anggota Tim dapat melakukan pekerjaan dengan baik, mengetahui perkembangan kemajuan pekerjaan dan pada akhirnya pekerjaan studi dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan KAK.
2. Koordinasi dengan Pengguna Jasa Selama proses pelaksanaan studi, Penulis akan selalu, melakukan koordinasi dan diskusi dengan Pemberi Tugas. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar hasil pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta jadwal pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.
3. Koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait Selama proses pelaksa-

naan studi, Penulis akan selalu melakukan koordinasi dan diskusi dengan Instansi Terkait terutama dalam pengumpulan dan verifikasi data dari dinas-dinas terkait Dalam melaksanakan pekerjaan ini, konsultan membagi kegiatan mejadi beberapa tahapan sebagai berikut: persiapan dan mobilisasi, melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi database yang ada dari instansi terkait beserta jenis/*software* yang ada, pengumpulan data primer berupa data eksisting dan data sekunder berupa literatur yang mendukung dalam proses pekerjaan ini, melakukan berbagai analisis dan pemodelan untuk memformulasikan bagan data dan database yang tepat dan dapat menterjemahkan serta merangkum seluruh sistem infrastruktur yang ada, dan melakukan Audiensi dan diskusi dengan Pemberi Pekerjaan Pembangunan Sistem Pencatatan Sirkulasi Dokumen Perizinan. Diagram alur pelaksanaan kegiatan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.

Lokasi penelitian terdiri dari dua tempat yaitu: (1) Kantor PT. Dinamika Metamorfosa Indonesia yang digunakan untuk tahap analisa, pengembangan sistem setelah data terkumpul, dan tempat bertukar pikiran dari antar tim dan penulis, (2) BP2T Provinsi Aceh, merupakan lokasi utama dari penelitian dikarenakan pengguna aplikasi semua berada di tempat ini dari administrator, operator dan usernya, serta digunakan untuk tempat sosialisasi dari sistem ini.

Data Primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah alur perizinan sumber daya alam, alur perizinan non sumber daya alam, form perizinan dan report (laporan).

Perizinan yang berada BP2T provinsi Aceh semua perizinan yang berhubungan dengan sumber daya alam yaitu katogeri perizinan sumber daya alam. Jumlah perizinan sumber daya alam yaitu 55 perizinan, sedangkan perizinan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam yaitu kategori perizinan non sumber daya alam berjumlah 84.



Gambar 1. Diagram Alur Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

E-Government

E-Government adalah kepanjangan dari *Electronic Government*, selanjutnya disebut “E-Gov”. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan Pemerintahan secara Elektronik. E-Gov sendiri adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Definisi E-Gov sendiri adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

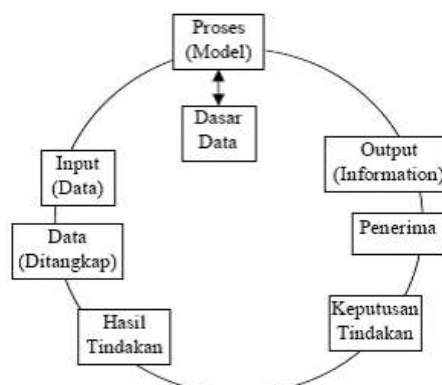
Sirkulasi Dokumen

Data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat berceritera banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk dihasilkan informasi. Data dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf-huruf atau alphabet, angka-angka, bentuk-bentuk suara, sinyal-sinyal, gambar-gambar dan sebagainya. Di dalam kegiatan suatu perusahaan, misalnya dari hasil transaksi penjualan oleh sejumlah salesman, dihasilkan sejumlah faktur-faktur yang merupakan data dari penjualan tersebut masih belum dapat berceritera banyak kepada manajemen. Untuk keperluan pengambilan keputusan,

maka faktur-faktur tersebut perlu diolah lebih lanjut untuk menjadi suatu informasi. Beraneka ragam informasi dapat dihasilkan darinya, misalnya :

- Informasi berupa laporan penjualan tiap-tiap salesman, berguna bagi manajemen untuk menetapkan besarnya komisi dan bonus.
- Informasi berupa laporan penjualan tiap-tiap daerah, berguna bagi manajemen untuk pelaksanaan promosi dan pengiklanan.
- Informasi berupa laporan penjualan tiap-tiap jenis barang, berguna bagi manajemen untuk mengevaluasi barang yang tidak atau kurang laku terjual.

Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus ini oleh John Burch disebut dengan siklus informasi (*information cycle*) atau ada yang menyebutnya dengan istilah siklus pengolahan data (*data processing cycles*). Gambar 2 menunjukkan siklus informasi.



Gambar 2. Siklus informasi

Sumber: Laporan Akhir Proyek Sistem Perizinan Online

Perizinan

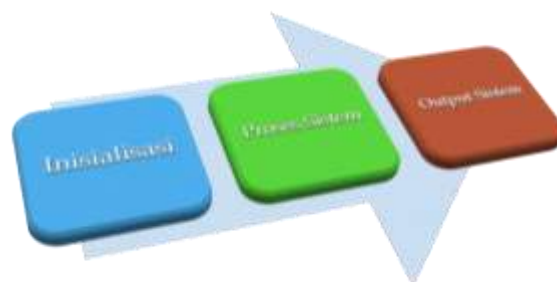
Dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kegiatan, maka mutlak diperlukan adanya izin guna mempermudah dan menertibkan jalannya suatu kegiatan. Untuk lebih memperjelas mengenai izin, maka berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian yang berkaitan dengan izin, baik tentang izin trayek, izin operasi angkutan maupun perizinan tertentu. Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Daerah tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan dalam Pasal 1 angka 16 dijelaskan pengertian izin trayek, yaitu : Izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang bermaksud mengoperasikan kendaraan umum angkutan kota pada trayek yang telah ditetapkan. Agar terwujud ketertiban di jalan, utamanya yang berhubungan dengan jalur atau trayek yang harus dilalui oleh kendaraan umum maka harus ditetapkan jalur khusus terhadap kendaraan tersebut guna menghindari kemacetan dan kesemrawutan.

Izin trayek diatur dalam peraturan daerah tersebut memang sangat perlu diatur mengingat banyaknya kendaraan beroperasi tanpa adanya izin trayek atau adanya izin tetapi bukan merupakan trayek sebenarnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 dijelaskan mengenai Izin operasi angkutan bahwa : Izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang bermaksud mengoperasikan kendaraan umum atau mobil

barang tidak dalam trayek dalam daerah. Ketentuan ini lebih memfokuskan pada kendaraan yang membawa barang, di mana pengaturannya diatur secara khusus mengingat banyaknya kendaraan barang sering beroperasi tanpa trayek atau beroperasi di luar wilayah izin trayeknya. Sedangkan pengertian perizinan tertentu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang dasar pemungutan retribusi daerah, adalah: Kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam perizinan yang berada didalam BP2T provinsi Aceh terdapat dua kategori perizinan yaitu perizinan sumber daya alam dan perizinan non sumber daya alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fitur System dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu: i)Inisialisasi, proses sistem, dan output sistem. *Fitur System* ditunjukkan pada Gambar 3 mengenai skema sistem pencatatan sirkulasi dokumen perizinan inisialisasi.



Gambar 3. Gambar Skema Sistem Pencatatan Sirkulasi Dokumen Perizinan Inisialisasi

Proses inisialisasi adalah proses awal yang dimana semua yang berkaitan dengan perizinan dideklarasikan terlebih dahulu dari mulai form, tahapan, dan operatornya. Didalam proses inisialisasi terdapat beberapa pendeklarasian secara dinamis yaitu: pendeklarasian form permohonan, pendeklarasian operator, pendeklarasian group operator, pendeklarasian tahapan perizinan, pendeklarasian group tahapan perizinan, pendeklarasian syarat pengajuan perizinan, pendeklarasian group syarat pengajuan perizinan, dan pendeklarasian perizinan.

Proses inisialisasi ini terdapat pada halaman administrator dari sistem pencatatan sirkulasi dokumen perizinan yang mendeklarasikan semua yang berhubungan dengan permohonan perizinan didepan sebelum proses permohonan dimulai.

Proses Sistem

Proses sistem adalah digunakan dalam untuk menjalankan sirkulasi dokumen perizinan dari pemohon mengumpulkan permohonan dokumen sampai surat rekomendasi keluar. Dalam tahapan

ini proses sistem menjalankan proses yang sudah dideklarasikan sebelumnya pada proses inisialisasi dari segi tahapan sampai dengan operatornya. Pemohon dalam proses sistem dapat melakukan monitoring terhadap perizinan yang diajukannya.

Output Sistem

Output berisikan kumpulan data yang sudah diolah dalam fase permohonan perizinan sampai perizinan tersebut dikeluarkan. Output yang dikeluarkan dalam fase ini adalah sebagai berikut: (1) Report dalam bentuk tabel, Report ini berisikan data dari permohonan perizinan yang diterbitkan, ditolak, dan disposisi, dan (2) Report dalam bentuk diagram, Report ini berisikan summary dari perizinan yang dikeluarkan sampai permohonan perizinan yang ditolak. Dalam report ini digunakan dua diagram yaitu chart dan *piechart*.

Capaian pembahasan masalah ditunjukkan pada Tabel 1 yaitu tabel perbandingan kondisi awal dan sesudah adanya sistem.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Kondisi Awal dan Sesudah Adanya Sistem

	Kondisi Sebelum Ada Sistem	Kondisi Sesudah Ada Sistem
Pembuatan Perizinan	Masih Manual	Dinamis
Pembuatan Form Perizinan	Masih Menggunakan Kertas	Paperless
Pendeklarasian Tahapan Perizinan	Masih Manual	Dinamis
Pendeklarasian Syarat Perizinan	Masih Manual	Dinamis
Diposisi Perizinan	Masih Manual	Dinamis
Reporting Perizinan	Masih Manual	Dilakukan oleh Sistem
Permohonan Pengajuan Perizinan Online	Konvensional	Online
Summary Perizinan Publik	Masih Manual	Dinamis
Tracking Permohonan Perizinan	Masih Manual	Dikerjakan oleh Sistem
Integrasi Antar Operator	Masih Manual	Dikerjakan oleh Sistem

Dalam sistem ini sudah dapat dibuat menjadi dinamis yang awalnya masih konvensional. Sistem ini pun sudah dapat menghemat dari segi biaya, waktu dan sdm dikarenakan sudah dapat terintegrasi dari pemohon sampai kesemua bagian didalam bidang perizinan. Didalam capaian sistem perizinan online semua aktivitas dari surat permohonan sampai kegiatan yang dilakukan oleh staff perizinan tersimpan dengan baik, dan juga dapat di keluarkan sebagai laporan dinamis yang menggunakan *pie chart*.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada proses permohonan perizinan yang dimana pada awalnya proses permohonan untuk penelitian sistem pencatatan sirkulasi dokumen perizinan pada badan pelayanan perizinan terpadu provinsi aceh masih dilakukan menggunakan proses manual menjadi proses yang berbasis digital. Didalam penelitian sistem pencatatan sirkulasi dokumen perizinan pada badan pelayanan perizinan terpadu provinsi aceh, proses integrasi awal masih dilakukan manual sudah difasilitasi dengan web base yang memungkinkan untuk para operator saling terintegrasi. Fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam sistem ini sudah sangat membantu dalam proses perizinan dan monitoring proses perizinan dari sisi user dan operator. Didalam sistem ini juga

transparansi dari kinerja BP2T Provinsi Aceh sudah mulai terjadi dimana diletakkan pada summary perizinan dan check status perizinan. Dari sisi pemohon atau user waktu yang digunakan untuk melakukan proses permohonan perizinan juga sangat mudah dengan teknologi web base, pemohon bisa melakukan registrasi sekaligus permohonan perizinan secara online dimana saja dan kapan saja secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Latif Al-Hakim. (2007). Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking. Idea Group Publishing.
- Supriyo Bhattacharjee. (2008). Software development life cycle (sdlc). page 56.
- James A. O. Brien. (2006). Pengantar Sistem Informasi. Salemba Empat.
- Helmut Drüke. (2005). Local Electronic Government. Routledge.
- Richard Gause. (2005). Local and Regional Government Information: How to Find It, How to Use It. GREENWOOD PRESS.
- Kemendagri. (2008). Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2008.
- Donald Norris. (2008). E-Government Research : Policy and Management. IGI Publishing.
- George M. Scott. (2002). Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen. Raja Grafindo Persada.